

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 2 1

SUBBAGIAN HUMAS



Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Cetak
Media Online	Mitra Post

Wilayah: Kabupaten Pati

Total Pendapatan Pati 2020 Rp2,6 Triliun, Paling Banyak Dana Transfer dari Pusat

<https://mitrapost.com/2021/06/05/total-pendapatan-pati-2020-rp26-triliun-paling-banyak-dana-transfer-dari-pusat/>

Pati, [Mitrapost.com](https://mitrapost.com) – Bupati Pati Haryanto mengungkapkan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Pati pada tahun 2020 lalu mencapai Rp2,6 triliun. Pendapatan daerah ini kebanyakan bersumber dari pendapatan transfer atau dana transfer dari Pemerintah Pusat.

Hal ini disampaikan Haryanto saat menghadiri Rapat Paripurna di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati, Kamis (3/6/2021) lalu. Rapat Paripurna itu membahas Penjelasan Bupati terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Pati tahun anggaran 2020.

Haryanto mengatakan realisasi pendapatan daerah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pati tahun anggaran 2020 berdasarkan tiga elemen. Yakni Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat dan pendapatan daerah lainnya yang sah.

PAD Kabupaten Pati pada tahun 2020 lalu mencapai Rp371,7 miliar. Lalu Pendapatan Transfer mencapai Rp2,17 triliun. Dan pendapatan daerah lain-lain yang sah mencapai Rp177,2 triliun.

“Total pendapatan daerah Kabupaten Pati pada tahun 2020 Rp2.666.375.437.006,” ungkap Haryanto di depan puluhan anggota DPRD Pati.

Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan undang-undang yang terdiri dari pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah dan lain-lain PAD yang sah.

Pendapatan transfer sendiri terdiri dari tiga hal, yakni pendapatan transfer pemerintah pusat yang terdiri dari dana perimbangan, bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak; kemudian; dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK).

Sedangkan pendapatan daerah lain-lain yang sah diantaranya bersumber dari dana bagi hasil pajak dari Provinsi Jawa Tengah dan dana desa. (*)